

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah merdeka selama 74 tahun, kemerdekaan itu didapat dengan menelan jutaan jiwa nyawa para pejuang, sudah menjadi kewajiban bagi kita, terkhusus pemerintah untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan cara terus berusaha melakukan berbagai cara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, salah satu upaya yang harus dan terus dilakukan yaitu dengan melalui pembangunan dari masa ke masa, dan dari kekuasaan ke kekuasaan, hal ini sejalan dengan pendapat Bambang Rudito (Purnama, 2015, hlm. 133) bahwa “pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk mengarahkan perubahan kebudayaan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemrakarsa pembangunan tersebut, yang dalam hal ini adalah pemerintah”.

Pembangunan juga merupakan perubahan yang direncanakan ke arah perbaikan, dengan tujuan untuk dapat memajukan kualitas semua sektor kehidupan masyarakat yaitu sosial, politik, ekonomi, dan budaya atau baik berupa fisik maupun non fisik guna mencapai kesejahteraan sosial. Namun dalam pelaksanaannya tidak selalu sebanding dengan harapan, karena semua perubahan terutama pembangunan senantiasa diikuti dengan permasalahan bahkan konflik, demikianpun dalam pembangunan Bendungan Waduk Jatigede.

Bendungan Jatigede terletak di Kabupaten Sumedang, Bendungan Jatigede memberi dampak yang berarti untuk pembangunan nasional khususnya pembangunan Jawa Barat. Tujuan utamanya yaitu penanganan banjir dan pengendalian irigasi guna memajukan daya produksi pertanian, menurunkan resiko banjir di daerah hilir, dan memotivasi perkembangan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah, dengan memanfaatkan potensi daerah pada bidang pariwisata yang meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka (Amalia and Malihah 2016, hlm. 2).

Menurut Blumer (Purnama 2015, hlm. 134) menyatakan bahwa ‘situasi baru mengenalkan pendefinisian kembali masalah-masalah, artinya setiap perubahan dalam rangka pembangunan selalu disertai dengan masalah yang muncul, pada kasus ini

sedikitnya masalah yang timbul dari pembangunan Waduk Jatigede adalah berubahnya mata pencaharian warga terdampak yang semula petani menjadi nelayan, perlu adanya penyikapan yang benar dan penyesuaian baru yang dilakukan masyarakat sekitar agar bisa *survive* di lingkungan baru'. Ini sejalan dengan pendapat Rostiyati (2014 dalam Purnama 2015, hlm. 142) “ketika lingkungan alam berubah dari pertanian menjadi sebuah genangan Waduk dalam areal yang luas, maka kemungkinan besar terjadi perubahan aktivitas”.

Perubahan ini harus disikapi secara bijak oleh semua pihak terutama pemerintah, karena berdasarkan konstitusi (UUD 1945), bahwa negara menjamin hak setiap warga negara terhadap sumber-sumber perekonomian seperti pekerjaan, kesejahteraan, kehidupan (lahan, pangan dan lingkungan) dan lainnya. Pasal 27 (2), UUD 1945 menyatakan bahwa “tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini merupakan bentuk pengakuan terhadap hak masyarakat atas pekerjaan tanpa kecuali.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM, dengan mengoptimalkan peran pendidikan yang sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap individu, harapannya tiap-tiap individu dapat berintegrasi dengan lingkungan dan dapat mengelola, menjaga serta memanfaatkan segala potensi alam atau lingkungan yang ada secara arif dan bijaksana sebagai manifestasi khalifah dimuka bumi.

Pendidikan menjadi titik sentral dalam pembangunan SDM yang berkualitas. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa

“jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, lebih lanjut dijelaskan pada pasal 13 ayat 1 terdapat 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal, kesemuanya perlu saling melengkapi dalam rangka pemenuhan tujuan pendidikan nasional”.

Indonesia memiliki angka putus sekolah yang cukup tinggi, terhitung pada tahun 2018 sebanyak 32.127 siswa (<http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>). Adapun di Kabupaten Sumedang terdapat 11.000 jiwa yang mengalami putus sekolah (<https://www.koransinarpagijuara.com/>). Putus sekolah merupakan problematika dari waktu ke waktu, Sebagai akibat dari putus sekolah ini dapat menurunkan kualitas SDM sehingga

Hasan Tafsir Maulana, 2021

PENYELENGGARAAN PELATIHAN ABON IKAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA PAKET C DI PKBM MAHARANI SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berimplikasi pada munculnya pengangguran. Pengangguran menurut Sukirno (2000, hlm. 8) kondisi seseorang yang termasuk pada golongan angkatan namun belum memperoleh pekerjaan. Di Indonesia jumlah pengangguran pada tahun 2019 sebesar 7,05 juta orang (<https://www.merdeka.com/>). Adapun tingkat pengangguran di Kabupaten Sumedang mencapai 7,52%, terdiri dari pengangguran terbuka berjumlah 41.261 dengan jumlah angkatan kerja 548.642 orang angkatan kerja (<https://inisumedang.com/>).

Pendidikan nonformal hadir untuk menanggapi permasalahan tersebut. Pendidikan Nonformal menurut UUD No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 12 yaitu "pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang". Pendidikan nonformal ini berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat".

Pendidikan nonformal memiliki beberapa satuan untuk menjalankan program-programnya, menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 26 ayat 4 menjelaskan bahwa satuan pendidikan terdiri atas "lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. (satuan-satuan nonformal)".

Program-program yang dapat dilaksanakan pada dunia pendidikan nonformal pun tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 3 yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Program-program yang dilaksanakan pada dasarnya menginginkan para peserta program memiliki kemandirian belajar, khususnya pada program pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C (UU SISDIKNAS no 20 tahun 2003).

Pendidikan kesetaraan memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) tersendiri, hal ini terlampir pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006, SKL program paket A dan paket B yaitu mampu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti Hasan Tafsir Maulana, 2021

PENYELENGGARAAN PELATIHAN ABON IKAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA PAKET C DI PKBM MAHARANI SUMEDANG

pendidikan lebih lanjut, jika mengacu kepada konsep life skill program paket A dan B setara dengan SD-SMP dalam jenjang ini difokuskan kepada personal dan social skill kedua nya merupakan bagian dari apa yang disebut dengan general life skill, pada program paket C yaitu dapat meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (lampiran Permendiknas No. 23 tahun 2006), Adapun kekhasan dari program kejar paket ini yaitu, paket A memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, paket B memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, dan paket C memiliki keterampilan berwirausaha (Dirjen Pemasarakatan, 2016). Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya lulusan baik kesetaraan paket A, B, maupun C harus memiliki kemandirian, untuk bekerja ataupun berwirausaha. Namun, pada kenyataannya kemandirian lulusan, khususnya pada kesetaraan paket C masih minim, hasil Survei di Kabupaten Sumedang yang memiliki 73 PKBM (<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>), hanya sekitar 20 PKBM yang melaksanakan pelatihan pada kesetaraan paket C, padahal melaksanakan pelatihan ini sudah menjadi kewajiban karena dengan pelatihan ini dapat mengoptimalkan kemandirian para lulusan. Adapun, dari 20 PKBM yang melaksanakan pelatihan dan dinyatakan berhasil rata-ratanya hanya sebanyak 33,3%. Lemahnya kemandirian paket C ini didasarkan pada tidak adanya monitoring dan evaluasi baik dari pemerintah maupun pengelola PKBM itu sendiri, PKBM tidak memiliki mitra untuk menyalurkan para lulusan untuk bekerja. Kurangnya regulasi dari pemerintah dalam mendukung lulusan paket C. kurangnya motivasi warga belajar dalam mengikuti program, terkadang hanya fokus pada tujuan pragmatis. Masih lemahnya manajemen pengelolaan dapat dilihat dari perencanaan yang belum bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam, keterampilan tidak berorientasi pada kebutuhan dan minat peserta sehingga kompetensi para lulusan masih rendah. Adapun pada sebagian PKBM masih belum tercukupinya kualifikasi tutor dan tidak adanya pendampingan teknis yang dilakukan oleh pengelola baik untuk bekerja maupun membentuk usaha bersama.

Kemandirian dapat ditumbuhkan dengan pengintegrasian program kecakapan hidup/life skills dengan menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana disebutkan oleh direktorat kepemudaan dirjen PLSP (2003), yaitu keterampilan yang dikembangkan berdasar pada minat kelompok sasaran, erat kaitannya dengan keunikan potensi wilayah setempat, dapat dikembangkan secara nyata sebagai sector kecil/industri

Hasan Tafsir Maulana, 2021

PENYELENGGARAAN PELATIHAN ABON IKAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA PAKET C DI PKBM MAHARANI SUMEDANG

rumah tangga, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi keterampilan untuk berusaha dan bekerja tidak terlalu teoritis akan tetapi bersifat aplikatif operasional.

Kemandirian sangat penting dimiliki oleh semua orang, dan tentunya hal ini harus dipersiapkan dengan matang, salah satunya melalui pendidikan, tanpa kemandirian seseorang akan sulit menjalani kehidupannya, manusia merupakan makhluk sosial, saling memberikan manfaat satu sama lain, dan untuk melakukan itu semua, minimalnya seseorang harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan memiliki kemampuan untuk bisa *bargain* dalam bermasyarakat, sehingga dia bisa bertukar manfaat dengan sesamanya.

PKBM Maharani merupakan salah satu lembaga nonformal yang telah menyelenggarakan program kesetaraan paket C diintegrasikan dengan program kecakapan hidup. Salah satu program yang dilaksanakannya yaitu pelatihan pembuatan abon ikan, hal ini didasarkan pada kondisi daerah Situraja yang mengalami perubahan aktivitas mata pencaharian, asalnya daerah tersebut bermata pencaharian sebagai petani namun akibat pembuatan Waduk Jatigede ini, masyarakat sekitar beralih profesi menjadi nelayan. Kemudian, permasalahan baru muncul terkait dengan ikan berukuran besar yang seringkali tidak terjual, untuk memanfaatkan ikan tersebut maka perlu adanya kompetensi tambahan untuk mengolah ikan yang dapat memberikan nilai jual.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa lulusan paket C memiliki tingkat kemandirian yang masih rendah. Faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan kemandirian tersebut adalah:

1. Dari 78 PKBM di Sumedang, hanya 20 PKBM yang melaksanakan program pelatihan, dan hanya 33.3% yang berhasil mencapai kemandirian.
2. Penyelenggara belum memahami tujuan penyelenggaraan *life skills* dengan baik.
3. PKBM Maharani merupakan salah satu lembaga nonformal yang telah menyelenggarakan program kesetaraan paket C diintegrasikan dengan program kecakapan hidup untuk menunjang kemandirian warga belajar. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pelatihan pembuatan abon ikan. Pelatihan tersebut

Hasan Tafsir Maulana, 2021

PENYELENGGARAAN PELATIHAN ABON IKAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA PAKET C DI PKBM MAHARANI SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disesuaikan dengan kebutuhan para warga belajar dan juga disesuaikan dengan kondisi alam di daerahnya.

4. Sasaran pelatihan pembuatan abon ikan PKBM Maharani ini adalah masyarakat desa pakualam yang merupakan salah satu desa terdampak pembuatan jati gede.
5. Warga belajar belum memiliki keterampilan untuk mengolah ikan, terkhusus membuat abon ikan. Dikarenakan perubahan aktivitas mata pencaharian masyarakat yang semula petani kini menjadi nelayan.
6. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan warga belajar, namun kegiatan ini sampai pada proses produksi. Dan PKBM pun memberikan dukungan berupa bantuan akses pemasaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, bahwa kegiatan untuk menumbuhkan kemandirian lulusan program paket C adalah pelatihan berbasis life skills yang disesuaikan dengan kondisi usaha yang ada disekitar program paket C, yaitu Pelatihan Abon Ikan yang diselenggarakan oleh PKBM Maharani. Maka penulis merumuskan masalah penelitian tentang “Bagaimana penyelenggaraan pelatihan abon ikan yang berbasis life skills dalam menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani?”. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan rancangan pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani?
2. Bagaimana penyelenggaraan pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani?

Hasan Tafsir Maulana, 2021

PENYELENGGARAAN PELATIHAN ABON IKAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA PAKET C DI PKBM MAHARANI SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana evaluasi pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani?
4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat apa dalam penyelenggaraan pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani?
5. Bagaimana kemandirian berwirausaha warga belajar paket C yang mengikuti pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Penelitian ini dapat mendeskripsikan penyelenggaraan pelatihan pembuatan abon ikan berbasis Life Skill dalam Menumbuhkan Kemandirian Lulusan paket C di PKBM Maharani”.

1.4.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk:

1. Mengungkap gambaran penyusunan rancangan pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani
2. Mendeskripsikan penyelenggaraan pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian belajar paket C di PKBM Maharani.
3. Mendeskripsikan evaluasi pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani
4. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha paket C di PKBM Maharani.
5. Mendeskripsikan kemandirian warga belajar paket C yang telah mengikuti pelatihan pembuatan abon ikan yang berbasis life skills.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasan Tafsir Maulana, 2021

PENYELENGGARAAN PELATIHAN ABON IKAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN WIRUSAHA PAKET C DI PKBM MAHARANI SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang pendidikan masyarakat khususnya pada kajian pendidikan nonformal dan pelatihan dalam menumbuhkan kemandirian berwirausaha warga belajar.

1.5.2 Aspek Kebijakan

Diharapkan dari hasil penelitian penulis dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam membuat pedoman-pedoman yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan yang dapat memberikan tambahan skill.

1.5.3 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga untuk senantiasa memperbaiki penyelenggaraan dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha para warga belajar.

1.5.4 Aspek Isu/Aksi Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi para lembaga-lembaga guna memperbaiki program pelatihan untuk menumbuhkan kemandirian berwirausaha warga belajar.

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Supaya mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan selanjutnya, maka berikut ini adalah rencana sistematika penulisan penelitian yang disesuaikan dengan ketentuan penulisan karya tulis ilmiah UPI (2019). Penulis membagi pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian atau teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian, yakni terdiri dari konsep

Hasan Tafsir Maulana, 2021

PENYELENGGARAAN PELATIHAN ABON IKAN BERBASIS LIFE SKILL UNTUK MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN WIRAUSAHA PAKET C DI PKBM MAHARANI SUMEDANG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pelatihan, tahap penyelenggaraan pelatihan, implementasi pelatihan, konsep pendidikan kecakapan hidup, dan konsep kemandirian.

3. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian ini membahas prosedur atau kegiatan penelitian meliputi tempat penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan analisis data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan ini menggambarkan terkait hasil penelitian yang meliputi: kondisi objektif pelatihan pembuatan abon sapi di PKBM Maharani kabupaten Sumedang, hasil penelitian, dan analisis hasil pembahasan penelitian.

5. Bab V Kesimpulan, Implikasi dan rekomendasi

Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi berasal dari penelitian yang telah dilakukan.